



TREN PENANGANAN KASUS KORUPSI TAHUN 2016

● DAFTAR ISI

○ PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tujuan
- Metodologi
- Sumber Data dan Waktu Pemantauan

TEMUAN

- Tren Penindakan Kasus Korupsi Selama 2016



PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

1. Informasi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak dipublikasi secara transparan, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan.*

2. Data jumlah kasus korupsi yang dilaporkan hanya berupa statistik akumulatif per tahun dan tidak tersedia detail kasus korupsi.



**) Berdasarkan hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, Kejaksaan dan Kepolisian tidak masuk dalam peringkat 10 besar. Tapi KPK masuk sebagai Badan Publik yang memiliki peringkat 10 dengan nilai 86,87 dan masuk dalam kategori Menuju Informatif.*

● TUJUAN

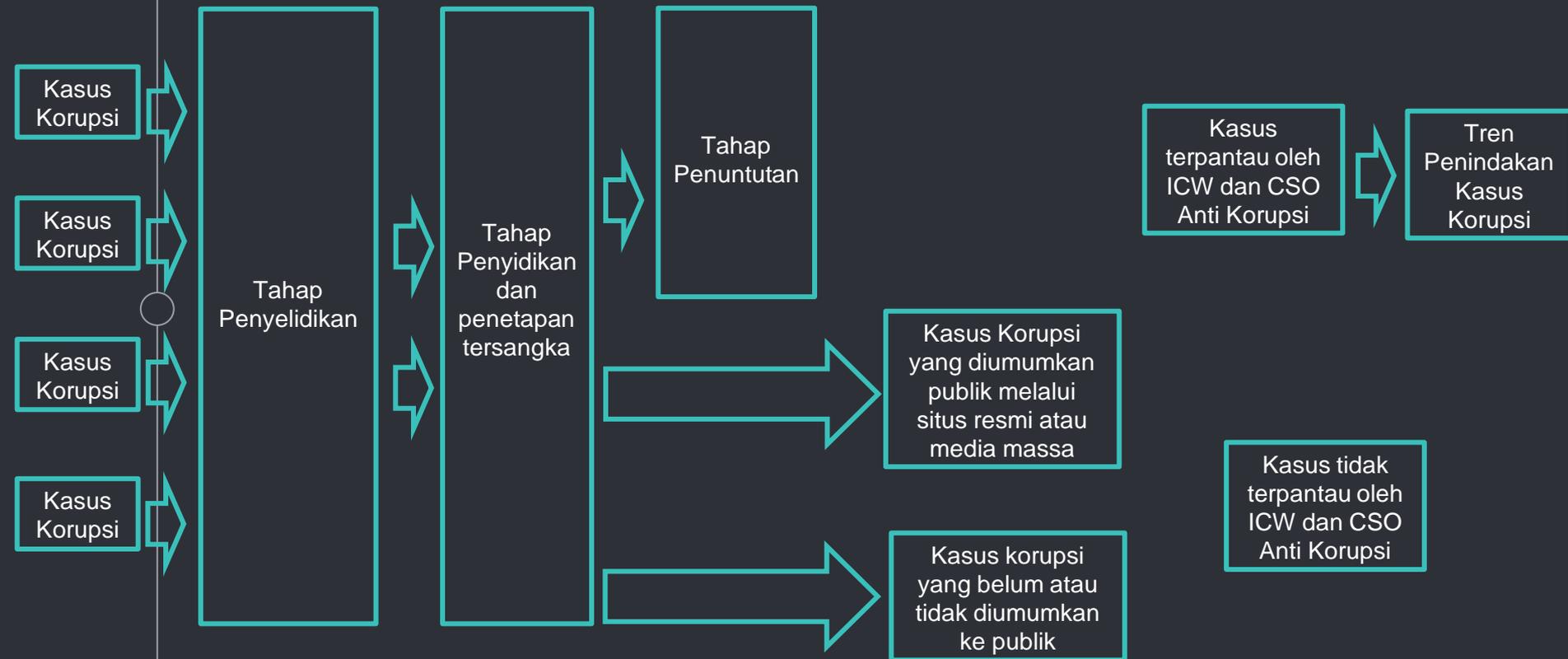
- Melakukan pemetaan atas kasus korupsi yang disidik oleh Aparat Penegak Hukum pada tahun 2016, meliputi : jumlah kasus korupsi, total nilai kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan, sektor korupsi terjadi, jabatan pelaku.
- Mendorong transparansi data kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum.



METODOLOGI

1. Melakukan pemantauan kasus korupsi di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka.
2. Pengumpulan data kasus korupsi yang telah diungkap ke publik oleh penegak hukum, baik melalui website resmi atau melalui media massa.
3. Melakukan tabulasi atas kasus – kasus yang terungkap ke publik dan terpantau oleh ICW.
4. Membandingkan statistik jumlah kasus dan kerugian negara serta penyuapan berdasarkan semester.
5. Melakukan analisis deskriptif atas kinerja penyidikan kasus korupsi.

BAGAN DATA KASUS KORUPSI TAHUN 2016 YANG TERPANTAU OLEH ICW





TEMUAN



KINERJA PENYELIDIKAN APH SELAMA TAHUN 2016 (PENYELIDIKAN → PENYIDIKAN)

Jumlah Kasus Korupsi

482 Kasus korupsi

Jumlah Tersangka

1.101 Tersangka Kasus Korupsi

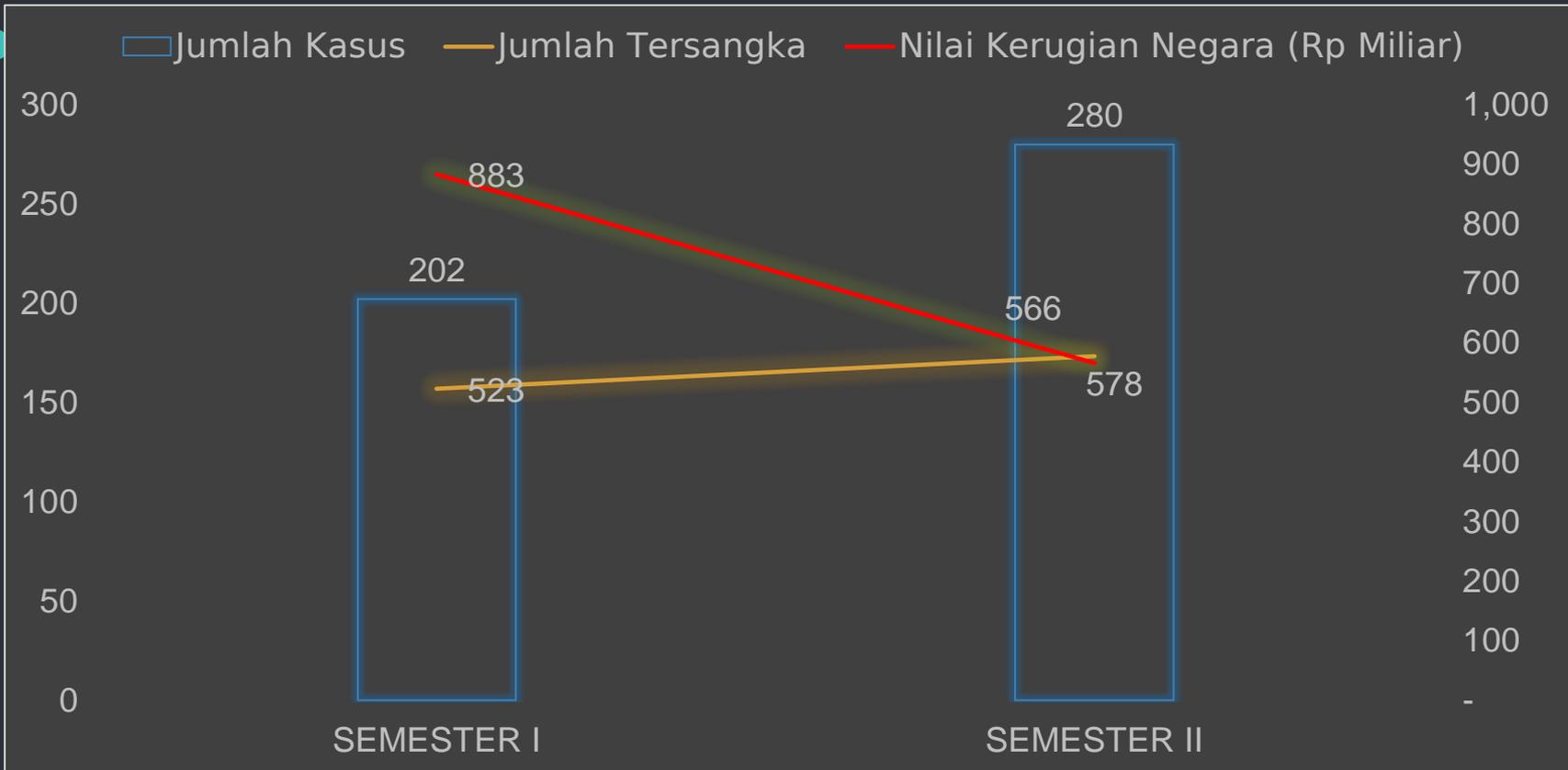
Nilai Kerugian Negara

Rp 1,45 Triliun

Nilai Suap

Rp 31 Miliar

PERBANDINGAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I 2016 DAN SEMESTER II 2016



- Adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi dari 202 kasus yang ditangani pada semester I menjadi 280 kasus pada semester II.
- Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka pun meningkat meskipun tidak signifikan. Pada semester I APH dapat menyidik sebanyak 523 tersangka. Sedangkan pada semester II APH mampu menyidik sebanyak 578 tersangka
- Meskipun angka penyidikan kasus korupsi dan jumlah penetapan tersangka meningkat, namun nilai kerugian yang ditimbulkan cenderung menurun. Pada semester I 2016 nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 883 miliar. Sedangkan pada semester II 2016 nilai kerugian negara menjadi Rp 566 miliar.

Pada semester II 2016, jumlah kasus korupsi yang nilai kerugiannya belum dihitung sebanyak 90 kasus. Sedangkan pada semester I 2016, kasus korupsi yang nilai kerugiannya belum dihitung sebanyak 52 kasus.

“

Dari 482 kasus korupsi yang berhasil dipantau oleh ICW, 6 kasus diantaranya adalah pengembangan kasus yang dilakukan oleh KPK. Contoh : Kasus E-KTP, Kasus suap kepada Ketua MK terkait sengketa pilkada Kabupaten Buton, dan kasus suap pengesahan APBD Musi Banyuasin

KASUS KORUPSI TAHUN 2016 BERDASARKAN MODUS

- Modus korupsi yang sering pada tahun 2016 adalah penggelapan sebanyak 124 kasus korupsi terjadi dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 205 miliar.
- Meskipun modus terbanyak ialah penggelapan, namun nilai kerugian negara yang cukup besar ada pada modus penyalahgunaan wewenang.

Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
Mark Up	58	Rp 207 miliar	-
Penggelapan	124	RP 205 miliar	-
Laporan Fiktif	47	RP 61,8 miliar	-
Penyalahgunaan Anggaran	53	109 miliar	-
Suap	35	-	Rp 31 miliar
Gratifikasi	2	-	-
Penyunatan / Pemotongan	16	Rp 49,6 miliar	-
Pemerasan	8	Rp 84 juta	-
Penyalahgunaan Wewenang	54	Rp 410 miliar	-
Kegiatan/Proyek Fiktif	71	Rp398 miliar	-
Anggaran Ganda	2	Rp 1,6 miliar	-
Pungutan Liar	11	-	-
Pencucian Uang	1	Rp 5,3 miliar	-
TOTAL	482	Rp 1,45 triliun	Rp 31 miliar

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN TAHUN 2016 BERDASARKAN JENIS KORUPSI



Kerugian Negara

Jumlah Kasus : 238 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian
Negara : Rp 1 triliun



Suap Menyuap

Jumlah Kasus : 33 kasus
Jumlah Nilai Suap : Rp 31
miliar



Gratifikasi

Jumlah Kasus : 2 kasus
Jumlah Nilai Gratifikasi :
Rp -



Pemerasan

Jumlah Kasus : 7 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian
Negara : Rp 84 juta



Penggelapan Dalam Jabatan

Jumlah Kasus : 3 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian
Negara : Rp 2,3 miliar



Procurement

Benturan Dalam PBJ

Jumlah Kasus : 2 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian
Negara : Rp -



Belum Diketahui

Jumlah Kasus : 197 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 442 miliar

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN TAHUN 2016 BERDASARKAN LOKASI (10 TERATAS)



JAWA TIMUR
Jumlah Kasus
64 Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 325 miliar



JAWA TENGAH
Jumlah Kasus 37
Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 28 miliar



JAWA BARAT
Jumlah Kasus 30
Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 179 miliar



**SUMATERA
UTARA**
Jumlah Kasus
28 Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 39 miliar



**SULAWESI
SELATAN**
Jumlah Kasus 27
Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 32,6 miliar



**SUMATERA
SELATAN**
Jumlah Kasus 21
Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 49 miliar



**SULAWESI
TENGGAHA**
Jumlah Kasus 20
Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 6,6 miliar



PUSAT
Jumlah Kasus 19
Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 211 miliar

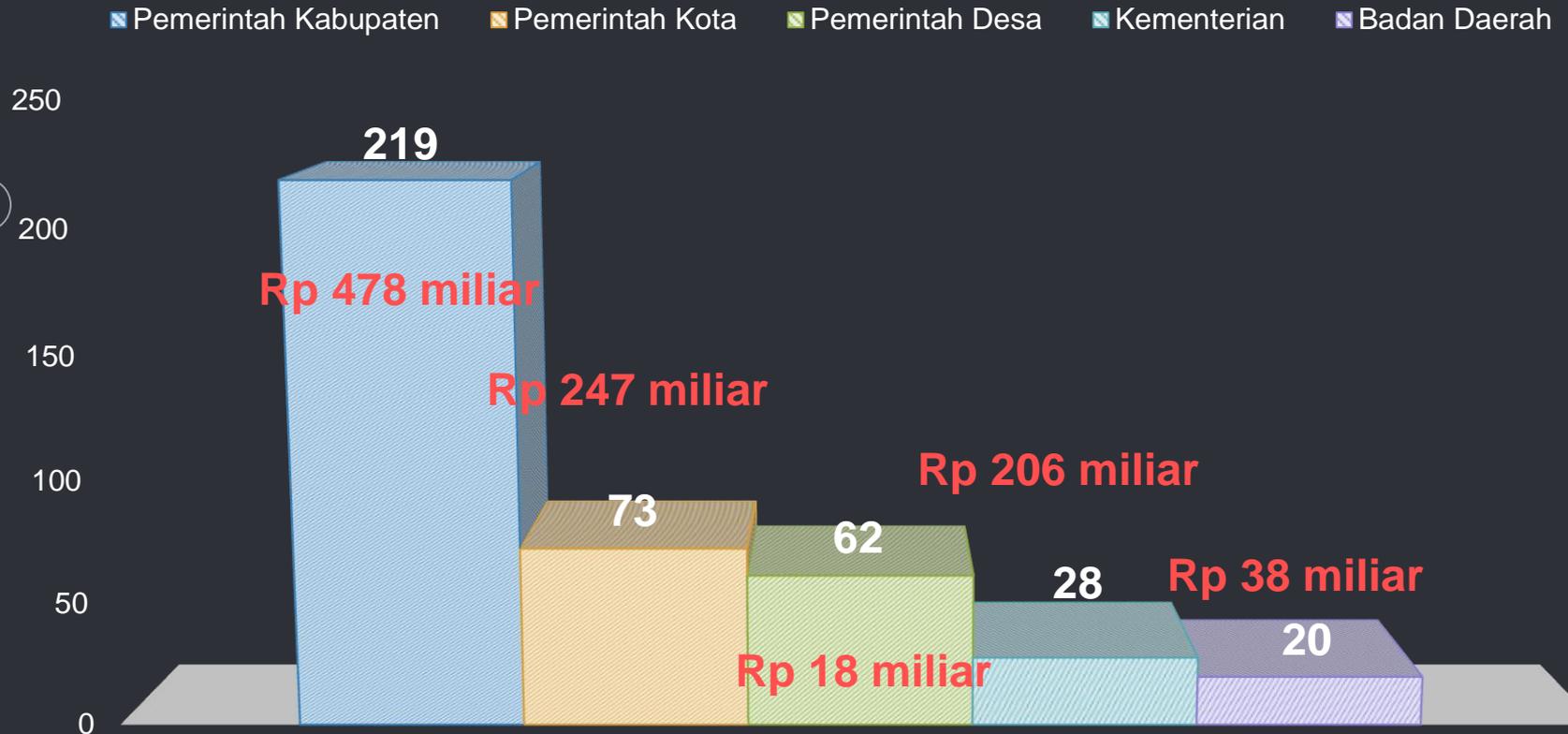


NTT
Jumlah Kasus 16
Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 4,3 miliar



ACEH
Jumlah Kasus 15
Kasus
Nilai Kerugian
Negara
Rp 23 miliar

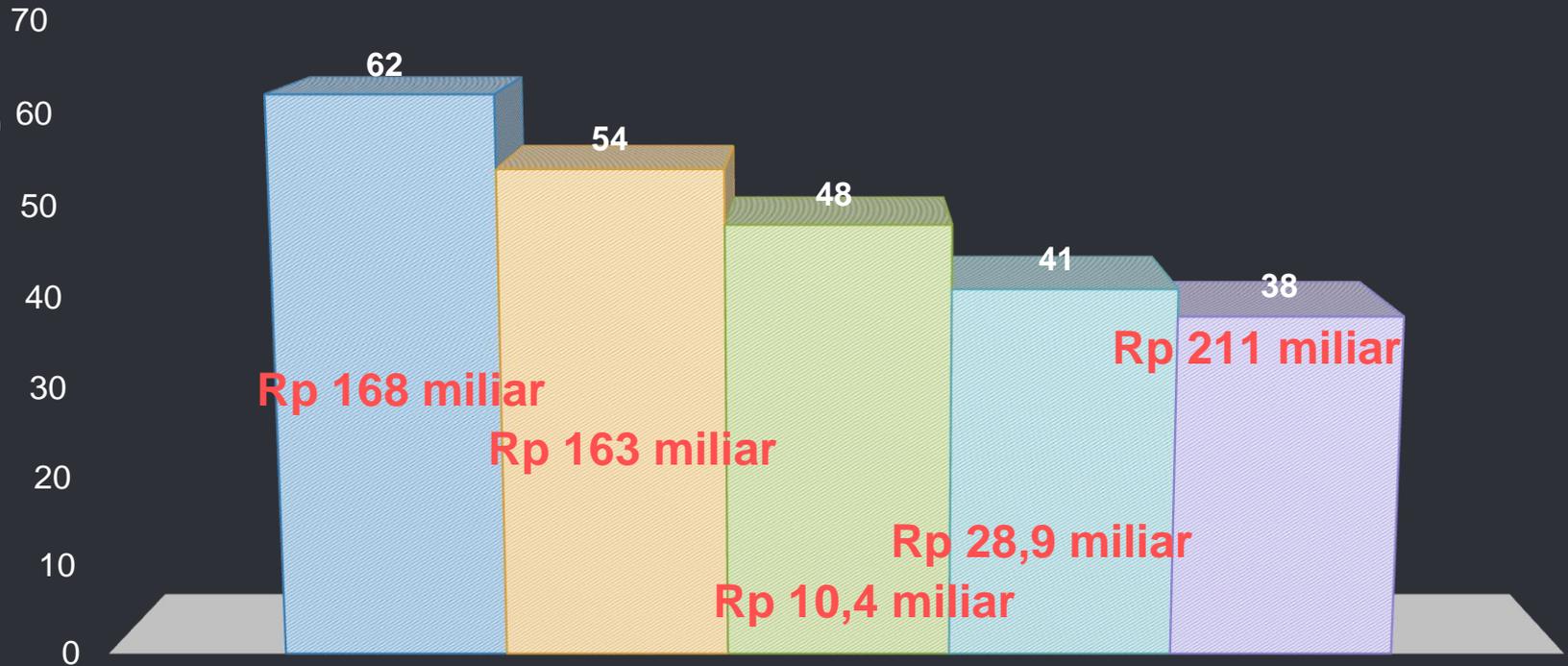
KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA TAHUN 2016 BERDASARKAN LEMBAGA (5 TERATAS)



- Pemerintah Kabupaten menjadi lembaga yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Ada sebanyak 219 kasus yang terjadi di Pemerintah Kabupaten dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 478 miliar.
- Kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Provinsi masih terjadi. Meskipun memang jumlah kasusnya tidak sebanyak di tingkat Kabupaten atau Kota.
- Pemerintah Desa menjadi salah satu lembaga yang rentan terjadi praktik korupsi. Hal ini karena anggaran yang dikelola cukup besar.

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN PADA TAHUN 2016 BERDASARKAN SEKTOR (5 TERATAS)

■ Keuangan Daerah ■ Pendidikan ■ Dana Desa ■ Sosial Kemasyarakatan ■ Transportasi



- Sektor yang paling banyak dikorupsi ada pada sektor keuangan daerah sebanyak 62 kasus. Contoh : perjalanan fiktif yang dilakukan oleh pejabat/pegawai pemda.
- Anggaran di sektor pendidikan tahun 2016 masih menjadi sektor yang rawan untuk dikorupsi.
- Terjadinya perluasan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2016, dana desa menjadi salah satu sektor yang rentan dikorupsi.
- Pada tahun 2016, anggaran dana desa sebesar Rp 47 triliun. Meskipun nilai kerugian negara yang timbul sebesar Rp 10,4 miliar, namun hal ini menjadi sinyal bahwa ada potensi penyalahgunaan anggaran yang terjadi di desa.

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN TAHUN 2016 BERDASARKAN PENGADAAN DAN NON PENGADAAN



Procurement

PENGADAAN

Kasus Korupsi
195 Kasus
Nilai Kerugian Negara
Rp 680 miliar
Nilai Suap
Rp 23,2 miliar



NON PENGADAAN

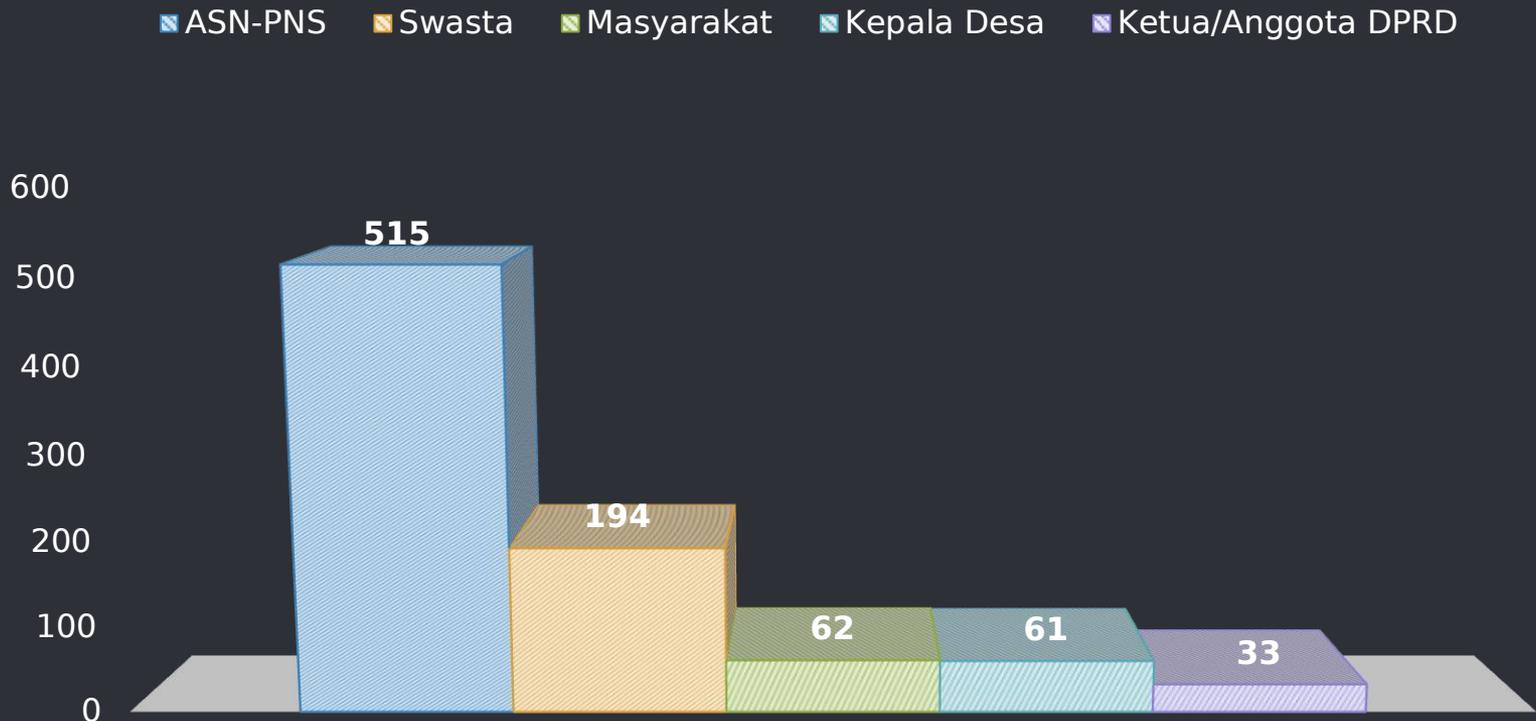
Kasus korupsi
287 Kasus
Nilai Kerugian Negara
Rp 769 miliar
Nilai Suap
Rp 7,8 miliar

- Sekitar 41% korupsi terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Meskipun sudah dilakukannya pengadaan secara online, namun celah korupsi masih dapat terjadi dalam penyusunan HPS yang di mark up atau adanya benturan kepentingan dalam PBJ seperti pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Walikota Madiun, Bambang Irianto dan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

“

- *Banyaknya korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa meskipun sudah menggunakan e-procurement, namun penting juga untuk dibuat e-contracting.*
- *Mendorong penggunaan e-catalogue dalam proses e-procurement agar meminimasilir terjadinya potensi risiko korupsi.*

JUMLAH AKTOR YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA (5 TERATAS)



- Sekitar 47 persen aktor korupsi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (PNS).
- Masyarakat dan kepala desa menjadi aktor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi jika tidak diimbangi dengan pemahaman transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut terbukti ketika masyarakat dan kepala desa menjadi aktor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi setelah ASN PNS.
- Pelaksanaan program reformasi birokrasi di daerah terutama di Pemerintah Kabupaten belum berhasil mencegah birokrasi di Pemkab terlibat korupsi.

KINERJA PENYIDIKAN APARAT PENEGAK HUKUM TAHUN 2016



Kasus Korupsi : 307 Kasus korupsi
Jumlah Tersangka : 671 Tersangka
Nilai Kerugian Negara : Rp 949 miliar
Nilai Suap : Rp -



Kasus Korupsi : 140 Kasus korupsi
Jumlah Tersangka : 327 Tersangka
Nilai Kerugian Negara : Rp 337 miliar
Nilai Suap : Rp 1,9 miliar



Kasus Korupsi : 35 Kasus korupsi
Jumlah Tersangka : 103 Tersangka
Nilai Kerugian Negara : Rp 164 miliar
Nilai Suap : Rp 29,1 miliar





- *Pada tahun 2016, anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menangani satu perkara hingga tuntas sebesar Rp 200 juta. Rinciannya antara lain Rp 25 juta tahap penyelidikan, Rp 50 juta tahap penyidikan, Rp 100 juta tahap penuntutan, Rp 25 juta tahap eksekusi penuntutan.**
- *Anggaran yang dimiliki oleh Kepolisian untuk menangani satu perkara korupsi mulai dari penyelidikan hingga penyidikan sebesar Rp 208 juta.***
- *Khusus untuk KPK, biaya penyidikan memiliki pagu anggaran Rp 12 miliar untuk proyeksi 85 perkara. Jadi, alokasi biaya untuk penanganan per perkara sebesar Rp 141 juta.****

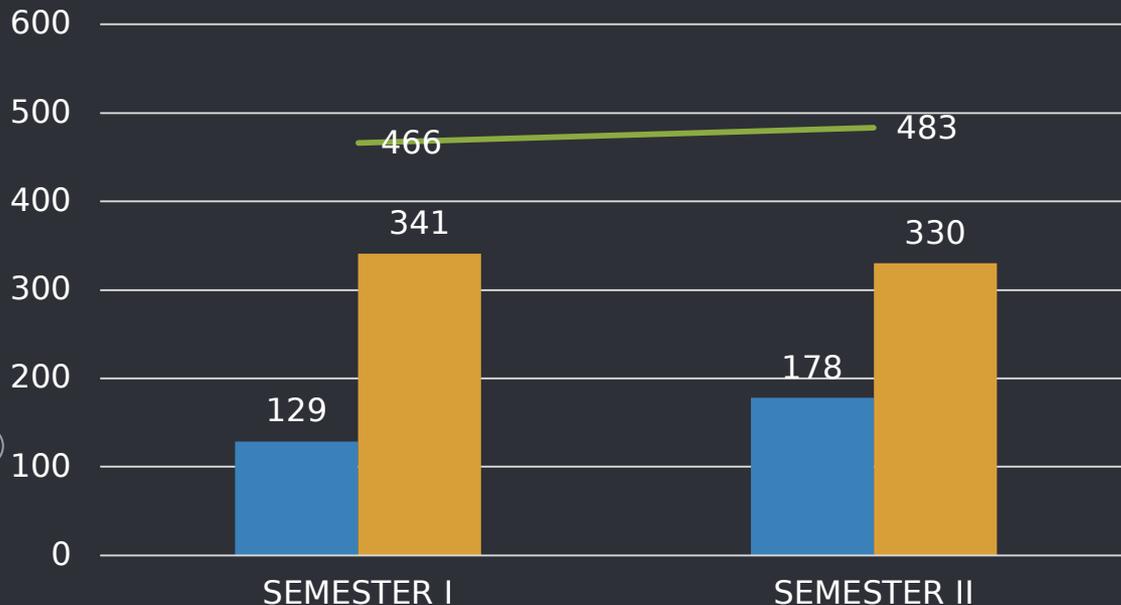
Sumber :

** Hasil Semiloka Nasional Tata Kelola Penanganan Kasus Korupsi tahun 2016.*

*** Hasil permintaan informasi yang dilakukan tahun 2015.*

**** Hasil Semiloka Nasional Tata Kelola Penanganan Kasus Korupsi tahun 2016.*

KINERJA PENYIDIKAN KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN TAHUN 2016



- Kasus Korupsi
- Tersangka Korupsi
- Nilai Kerugian Negara (Rp miliar)



Kerugian Negara

Jumlah Kasus : 168 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 577 miliar



Pemerasan

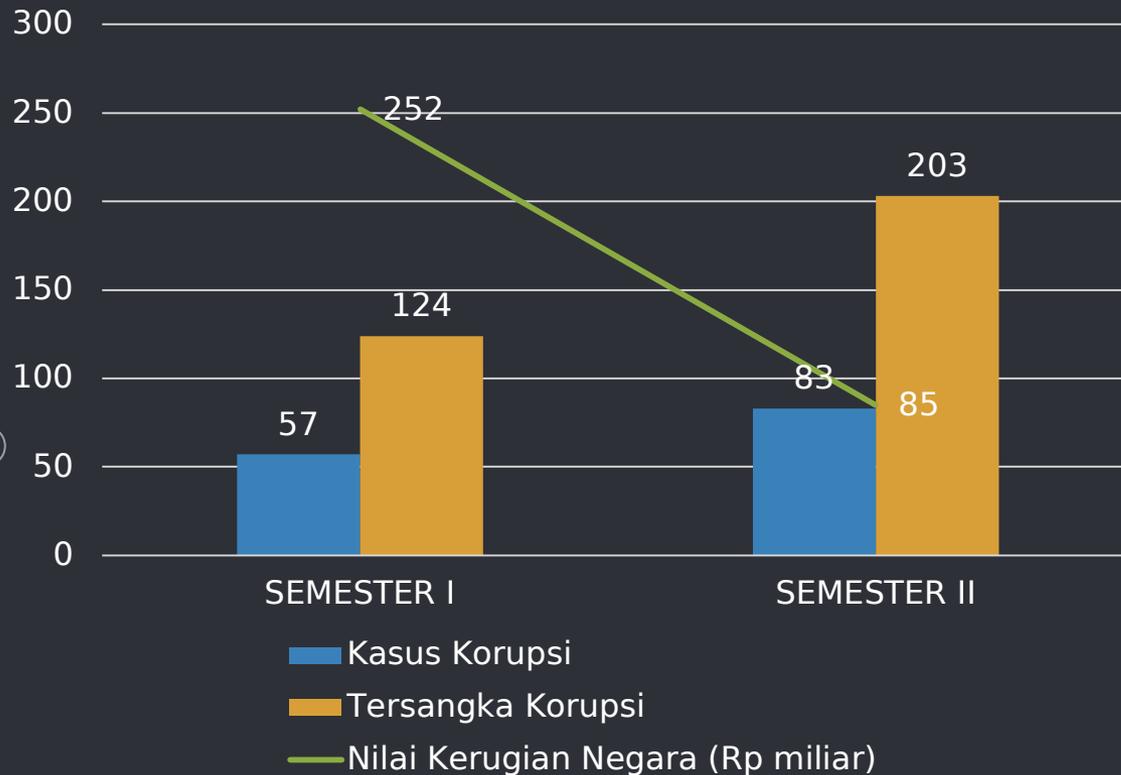
Jumlah Kasus : 2 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp -



Penggelapan Dalam Jabatan

Jumlah Kasus : 1 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 1,7 miliar

KINERJA PENYIDIKAN KASUS KORUPSI DI KEPOLISIAN TAHUN 2016



Kerugian Negara

Jumlah Kasus : 64 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 263 miliar



Suap Menyuaup

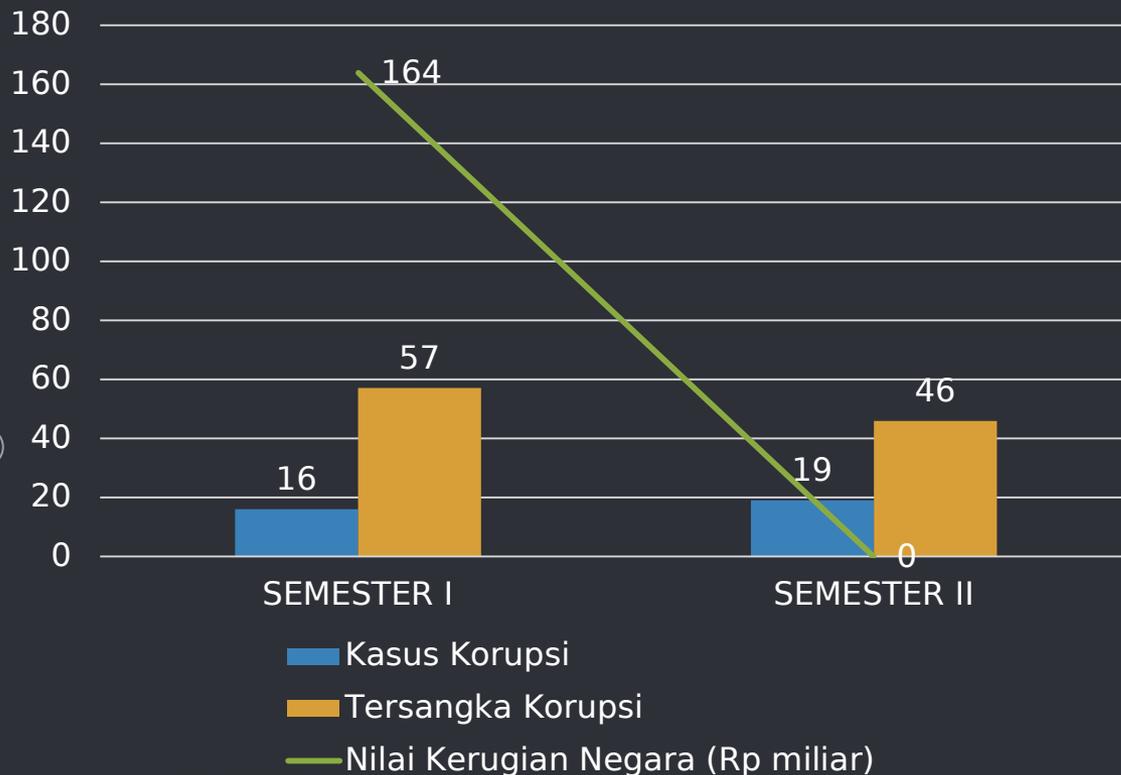
Jumlah Kasus : 8 Kasus
Jumlah Nilai Suap : Rp 1,9 miliar



Pemerasan

Jumlah Kasus : 4 Kasus
Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 9 juta

KINERJA PENYIDIKAN KASUS KORUPSI DI KPK TAHUN 2016



Kerugian Negara
 Jumlah Kasus : 6 Kasus
 Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 164 miliar



Suap Menyuap
 Jumlah Kasus : 24 Kasus
 Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 29,1 miliar



Procurement

Benturan Kepentingan Dalam Jabatan
 Jumlah Kasus : 2 Kasus
 Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp - miliar

“

Berdasarkan pantauan ICW selama tahun 2016, KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 17 kasus. Tersangka yang tertangkap diantaranya adalah anggota DPR, Ketua DPD, jaksa dan pegawai di lingkungan pengadilan. Setidaknya ada dua jaksa yang ditangkap serta enam pegawai di lingkungan pengadilan yang diantaranya Ketua Pengadilan dan Hakim Ad Hoc.

Nilai kerugian negara pada semester II khusus penyidikan yang dilakukan oleh KPK belum diketahui. Karena KPK pada semester II lebih cenderung melakukan operasi tangkap tangan.

TIMELINE PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SELAMA TAHUN 2016

Kasus dugaan suap kuota gula impor yang melibatkan Irman Gusman, Ketua DPD RI.

Kasus dugaan korupsi BPJS Kesehatan di Subang yang melibatkan Bupati Subang, Ojang Suhandi dan Jaksa di Kejati Jabar.

Kasus dugaan korupsi pemberian izin pertambangan di Sulawesi Tenggara yang melibatkan Gubernur Sultra, Nur Alam.

Kasus dugaan korupsi pembangunan pasar besar Madiun yang melibatkan Walikota Madiun, Bambang Irianto.

Kasus dugaan korupsi cetak sawah Ketapang yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dan melibatkan Ajun Komisaris Besar Brotoseno,

Kasus dugaan korupsi penjualan asset milik PT Panca Wira Usaha (BUMD) yang melibatkan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Kasus dugaan suap proyek di KemenPUPR yang melibatkan anggota komisi V DPR dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti.

Kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla yang melibatkan Eko Susilo Hadi selaku Deputy Informasi, Hukum, dan Kerjasama di Bakamla.

Kasus dugaan suap proyek 12 jalan di Sumatera Barat yang melibatkan anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana.

Kasus dugaan suap terkait perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Janner Purba sebagai Hakim Tipikor PN Bengkulu.

Kasus dugaan suap tentang Raperda yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks Grand Indonesia yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

KESIMPULAN

- Penyidikan kasus korupsi meningkat dari semester I ke semester II tahun 2016 baik dari segi jumlah kasus dan jumlah tersangka. Namun ada penurunan dari segi kerugian negara. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kasus yang belum dihitung kerugiannya.
- Sepanjang tahun 2016 KPK berhasil melakukan OTT sebanyak 17 kasus diantaranya melibatkan anggota DPR, anggota DPRD, hakim, jaksa.
- Tahun 2016 KPK menggunakan pasal Benturan Kepentingan dalam PBJ yang melibatkan Walikota dan Bupati.
- Pengadaan Barang dan Jasa secara online belum steril dari praktik korupsi.
- Banyaknya ASN yang tertangkap melakukan tipikor menandakan bahwa belum berhasilnya reformasi birokrasi khususnya di daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota).
- Meluasnya kasus korupsi hingga ke Desa menunjukkan bahwa adanya kerentanan dana desa yang di manipulasi oleh *local elite* dan berdampak pada *local elite capture*.

REKOMENDASI

- Perlu adanya sinergi antara penegak hukum dengan BPK atau BPKP dalam hal menghitung kerugian negara khususnya dalam hal memberikan barang bukti yang dibutuhkan BPK/BPKP untuk menghitung kerugian negara.
- KPK jangan hanya menysasar aktor korupsi di lembaga pengadilan, namun juga harus menindak pelaku korupsi di lembaga penegak hukum.
- APH perlu memperluas penerapan pasal tipikor berdasarkan jenis korupsi.
- Perlu adanya pembuatan sistem e-contracting agar proses pengadaan lebih transparan. Serta mengoptimalkan penggunaan e-catalogue pembelian barang.
- Perlu adanya evaluasi terhadap birokrasi di daerah.
- Perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan hingga evaluasi agar meminimalisir *local elite* mengontrol anggaran desa.